

**ABSTRAK**  
**Bima<sup>1</sup>**  
**Dr, Fuadi, SH, M.H<sup>2</sup>**  
**Zuleha, S.H, M.H<sup>3</sup>**

Tindak kriminal yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal terus berkembang dengan sebagai senjata tanpa mengetahui prosedur penggunaan yang sesungguhnya sehingga disalahgunakan untuk perampokan atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Secara normatif, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948.

Penelitian memiliki untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Aparat dalam kasus pencurian dan kekerasan . Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan kepemilikan senjata api oleh oknum aparat, dan untuk mengetahui penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh oknum aparat.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Empiris , dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. dan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode library research dan field research disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku. dengan menggunakan metode library research dan field research disesuaikan dengan kualifikasi penelitian,

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Pengaturan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Aparat Dalam Kasus Pencurian Dan Kekerasan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1948. Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang meliputi prinsip –prinsip : *legalitas*, Kajian yuridis, Faktor Yang Menyebabkan Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Aparat dapat memperoleh kepemilikan senjata api berdasarkan faktor : *nesesitas*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; *proporsionalitas*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Oknum Aparat, Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Aparat Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif

Saran dalam penelitian ini adalah dalam pengamanan dan ketertiban dalam masyarakat, disarankan juga bagi masyarakat mendukung kinerja oknum aparat dalam proses pengamanan, dan saling bekerja sama terhadap tujuan keamanan lingkungan Prosedur kepemilikan senjata hendaknya harus selektif lebih akurat agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak aparat.

Kata Kunci : penegakan Hukum, penyalahgunaan Senjata Api, Oknum Aparat

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua